



Kawasan Kumuh Bantaran Sungai Dibenahi

● SILVY DIAN SETIAWAN

Dibutuhkan akses jalan di tepi sungai untuk kepentingan umum.

YOGYAKARTA — Kondisi permukiman kumuh di wilayah bantaran sungai di Kota Yogyakarta menjadi perhatian serius jajaran pemerintah kota setempat. Selain rawan terkena banjir dan longsor saat musim hujan, permukiman itu juga menghambat akses jalan umum.

Oleh karenanya, ditegaskan Kasie Peningkatan Perairan dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

(PU Perkim) Kota Yogyakarta, Herka Hanung Wijaya, perlu dilakukan penataan terhadap permukiman ini guna melindungi sungai dan warga di bantaran sungai yang berpotensi terkena longsor saat musim hujan.

Terkait upaya itu, pihaknya terus mengupayakan agar masyarakat yang bermukim di kawasan bantaran sungai dapat mundur. Namun ia mengakui masih ada beberapa masyarakat yang belum mau mundur dari pinggir sungai. Sementara, dibutuhkan akses jalan di tepi sungai untuk kepentingan umum.

"Masing-masing kelurahan yang ada di bantaran sungai itu masih ada beberapa yang belum mau mundur. Kadang jalannya pun juga blm lebar. Daerah yang (masyarakatnya) belum mau mundur seperti di (Kelurahan) Bener, Kricak, Tegalrejo," kata Herka, akhir pekan lalu.

Terbatasnya akses karena kurang lebarnya jalan, maka pembersihan sungai pun masih mengalami kendala. Sebab, saat ini pembersihan masih dilakukan secara manual karena alat berat tidak bisa masuk ke lokasi. Terlebih lagi, lanjutnya, akses tersebut juga berguna jika terjadi bencana dapat dilakukannya penanganan secara maksimal.

"Sementara ini kita ambil tiga meter (jarak minimum permukiman warga dari bantaran sungai). Tiga meter itu dengan pertimbangan ambulance sudah bisa masuk kalau ada sakit bisa dibawa ke RS secepatnya. Untuk penanganan kebencanaan juga," tambahnya.

Sehingga, dilakukan penataan melalui upaya pendataan kepemilikan tanah bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, berdasarkan program 'Kota Tanpa Kumuh' atau Kota-

ku. Sebab, sebagian besar tanah tersebut merupakan milik keraton. Untuk mewujudkan hal tersebut, baik masyarakat dan pemerintah harus berupaya bersama.

Karena, ujar dia, program tidak akan berjalan jika tidak adanya sinergi antara keduanya. "Sungai itu tanggung jawab kita bersama, tidak bisa kemudian diserahkan kepada pemerintah saja. Masyarakat, Pemkot, Pemprov, dan BBWS harus bersinergi. Kalau ada yang tidak bersinergi gak akan jalan. Dibutuhkan kesadaran masyarakat juga," ujarnya.

Meski demikian, ia menggarisbawahi penataan tidak akan dilakukan dengan cara melakukan pengusuran terhadap warga yang tinggal di bantaran sungai. Namun, akan dilakukan pendekatan kepada masyarakat untuk dapat mundur dari bantaran sungai. "Kita lakukan pendekatan manusiawi. Bukan kita lakukan pemaksaan dan sebagainya".

Program tersebut, lanjutnya, pada tahun ini menasar 11 kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta, dengan fokus penataannya memang di permukiman kumuh yang ada di bantaran sungai.

"Kita menasar di 11 kelurahan, fokus ke Sungai Winongo. Mulai dari Kelurahan Kricak sampai Gedongkiwo. Termasuk menata bantaran-bantaran sungai. Karena mayoritas kawasan kumuh itu ada di bantaran sungai sekarang," katanya.

Program tersebut mencakup pendataan kepemilikan tanah terhadap warga yang tinggal di bantaran kali. Sebab, sebagian besar kepemilikan tanah di kawasan kumuh bantaran sungai merupakan tanah milik keraton. "Selama ini kan mereka tidak punya surat keterangan tanah (SKT). Karena status tanahnya itu milik keraton, mereka hanya asal bangun," jelasnya.

Diharapkan, dengan dilakukannya pendataan warga bisa mendapatkan SKT dan dapat mundur dari bantaran sungai dengan memiliki SKT yang telah diakui keabsahannya. ■ ed: yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005